**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU JABAR DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015**

**ARTIKEL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sidang Tesis**

**Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi**

**Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

**Oleh:**

**Harminus**

**148080015**



**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

**BANDUNG**

**2017**

***ABSTRACT***

*This research is concerned with the communication strategy in maintaining the state civil apparatus neutrality in the regional election, in the context of a theory of social action. Based on the P-Process model, communication strategy consists of five levels, analysis, strategic design, development and testing, implementation, and evaluation. Through the qualitative research method, the analysis techniques in use was descriptive.*

*Based on the results of the research known, the Election Supervisory Board in West Java maintained the neutrality of state civil apparatus through the dissemination of information. This maintenance process through the stages of analysis, strategic design, development and testing, implementation, and evaluation. Thus, this communication strategy other than a political activity as well as an arena of ideas and beliefs people have are systematically related to actual, spiritual and material conditions of existence. The result of this research showed that the implementation of communication strategies more emphasized on group communication than mass or interpersonal communication.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berkenaan dengan strategi komunikasi dalam menjaga sikap dan/atau perilaku netral aparatur sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah, dalam konteks teori tindakan sosial. Berdasarkan kepada model *P-Process*, strategi komunikasi terdiri dari lima tataran, yaitu tataran analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, melalui metode kualitatif, kajian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) melakukan perubahan sikap dan/atau perilaku para aparatur sipil negara di daerah Jawa Barat, melalui penyebaran informasi atau pesan. Proses penyebaran pesan ini dilakukan melalui tahapan analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu jabar selain sebagai sebuah aktivitas politik, juga merupakan sebuah arena dari berbagai ide dan keyakinan yang secara sistematis berkaitan dengan kondisi aktual, spiritual dan material di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula, implementasi dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar lebih menekankan kepada komunikasi kelompok daripada kepada komunikasi massa atau antarpribadi.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

Pilkada merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, akan tetapi dalam prakteknya masih sering dijumpai berbagai penyimpangan-penyimpangan. Kecurangan seperti politik uang, intimidasi, *black campaign* (kampanye hitam), curi *start* kampanye dan kampanye diluar jadwal, manipulasi data, mobilisasi dukungan, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), keberpihakan penyelenggara Pilkada, dan lain-lainnya senantiasa mewarnai pada setiap momentum Pilkada.

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pada pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada yaitu kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pangandaran, Indramayu, dan kota Depok, terdapat 9 (sembilan) kasus dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN. Kesembilan kasus tersebut, terjadi di kabupaten Cianjur sebanyak 4 kasus, Karawang 2 kasus, Indramayu 1 kasus, Sukabumi 1 kasus, dan Tasikmalaya 1 kasus.

Dalam menjaga netralitas ASN dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengembangkan strategi pencegahan yang merupakan upaya preventif terhadap potensi-potensi pelanggaran Pilkada. Hasil dari upaya pencegahan tersebut adalah meminimalisasi potensi pelanggaran Pilkada baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada maupun stakeholders Pilkada. Hal ini tidak terkecuali bagi potensi-potensi pelanggaran atas netralitas ASN.

Demikian juga efektivitas Bawaslu Jabar dalam mencegah ketidak netralitas ASN pada proses Pilkada tidak lepas dari strategi komunikasi yang dilakukannya. Berhasil tidaknya kegiatan (proses) komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Dengan kata lain, strategi komunikasi termasuk salah satu kunci keberhasilan Bawaslu Jabar dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh ASN.

* 1. **Rumusan Masalah**

Secara umum, penelitian ini mengkaji *bagaimana* *strategi komunikasi Bawaslu Jabar dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Tahun 2015*?

Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana *analisis* strategik, *rancangan* strategik, *pengembangan dan pengujian* rancangan strategik, *implementasi* strategik dan *evaluasi* strategi komunikasi Bawaslu Jabar dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Tahun 2015.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu mengetahui *strategi komunikasi Bawaslu Jabar dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Tahun 2015*. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui *analisis* strategik, *rancangan* strategik, *pengembangan dan pengujian* rancangan strategik, *implementasi* strategik dan *evaluasi* strategi komunikasi Bawaslu Jabar dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Tahun 2015.

* 1. **Signifikasi Penelitian**

Dari sudut kepentingan teoritik, signifikasi penelitian ini diharapkan dapat:

1. Melengkapi dan memperjelas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti komunikasi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melengkapi konsep dan teori menyangkut strategi komunikasi dalam bidang komunikasi politik, khususnya yang berkenaan dengan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dari kepentingan praktis diharapkan:

1. Penelitian ini memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi dunia politik, khususnya untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada.
2. Pemahaman ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami realitas politik kaitannya dengan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, sehingga mereka dapat menyadari realitas sesungguhnya dari apa yang mereka saksikan selama ini.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan positif bagi stakeholder Pemilu/Pilkada baik di tingkat nasional maupun lokal mengenai arti penting netralitas ASN dalam Pilkada, khususnya untuk mengetahui strategi komunikasi yang efektif yang diterapkan oleh pengawas Pemilu/Pilkada dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam proses Pilkada, atau strategi komunikasi yang harus dilakukan agar dalam proses Pilkada ASN tetap menjaga netralitasnya.

**BAB II**

**KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

* 1. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian secara luas yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variable-variable yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari strategi komunikasi secara luas dikemukakan dalam pembahasan di bawah ini.

* 1. **Teori-teori**
     1. ***Social Action Theor*y**

*Social action Theory* merupakan ‘cabang’ dari *Social Behaviorism*, yang berfokus pada individu sebagai subjek. Teori ini memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberi makna oleh individu tersebut. Pendekatan Teori Tindakan Sosial ini didasarkan kepada teori interpretifnya Max Weber yang mengklaim perlunya mengetahui tujuan subjektif dan maksud dari para pelaku tindakan sosial sebelum pengamat dapat memahami arti dari aksi sosial ini.

Pemikiran Weber tentang tindakan sosial membantu memperbaiki pemahaman tentang watak dan kemampuan-kemampuan aktor sosial secara individual melalui sebuah tipologi tentang berbagai cara dimana individu yang bersangkutan bisa bertindak di dalam lingkungan eksternalnya, sehingga Weber membedakan empat tipe tindakan sosial yang berbeda-beda dimana seorang aktor bisa terlihat, berikut empat tindakan sosial menurut Weber (Ritzer, 2012: 216):

1. *Tindakan rasional bersifat instrumental* dikatakan juga *tindakan rasional berorientasi tujuan*
2. *Tindakan rasional berdasarkan nilai* (*value-rational action*)
3. *Tindakan afektif* yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional pelaku.
4. *Tindakan tradisional* yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun.

Satu hal yang perlu dicatat, Weber mengakui ada tindakan-tindakan yang merupakan kombinasi dari keempat jenis tindakan ini. Ia pun beralasan, orang-orang memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami tindakan secara lebih bervariasi dan rasional dibandingkan dengan memahami tindakan yang didominasi oleh emosi atau tradisi (Ritzer, 2012:216).

* + 1. **Partisipasi Sosial**

Menurut Bertrand (1958:142) mendefinisikan partisipasi sosial sebagai, “…*those diverse activities engaged in by a person either with other individuals or with groups*.” Dari pendapat ini dapat dilihat, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem dalam suatu kegiatan.

Bila dikaitkan dengan pengertian partisipasi sosial yang dikemukakan oleh Bertrand, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, partisipasi sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi sosial pasif, yaitu keikutsertaan seseorang atau lebih yang didasarkan atas perintah atau keharusan.
2. Partisipasi sosial aktif, yaitu keikutsertaan seseorang yang didasarkan atas kesadaran serta keyakinan, hal itu akan bermanfaat baginya. Umumnya pasrtisipasi bentuk ini lebih bersifat spontan.

Kaitannya dengan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada), partisipasi sosial yang diharapkan muncul dari masyarakat ialah partisipasi sosial aktif. Oleh sebab itu dapat dikatakan, pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dapat berhasil jika ia dapat memunculkan suatu sikap serta perilaku masyarakat atau aparatur sipil negara untuk ikut serta atau terlibat secara sadar dalam setiap program perubahan sosial tersebut. Kesadaran masyarakat akan timbul jika mereka selain merasakan manfaatnya juga mempunyai rasa memiliki. Artinya, proses perubahan ini harus didasarkan kepada nilai-nilai dasar yang bertumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.

* + 1. **Strategi Komunikasi**

Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain “strategi dan taktik” berkomunikasi yang dikembangkan komunikator (Erlina Hasan, 2014:42). Carl Von Clausewitz memberikan perbedaan antara taktik dan strategi, bahwa taktik adalah seni menggunakan ‘kekuatan bersenjata’ dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka tersebut adalah strategi. Dalam strategi ini tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya (Toni Andrianus, Pito dkk, 2006:196-197).

Middleton (1980) seorang pakar perencanaan komunikasi menyatakan bahwa “strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal” (Hafied Cangara, 2016:252-253).

Tujuan sentral strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, “*Techniques for Effective Communication*” menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: *to secure understanding* adalah memastikan komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimaannya itu harus dibina (*to establish acceptance*). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (*to motivate action*). (Effendy, 2007:32)

Ada sejumlah model yang sering dipakai secara luas untuk menginformasikan komunikasi dalam program pembangunan, misalnya *ACADA*, *P-Process* dan *COMBI* (Tweneboa-Kodua, *et al*., 2008:7-10). Berikut ini penjelasan singkat dari model *P-Process* yang terdiri dari lima langkah, yaitu:

* + 1. Analisis
* Analisis Situasi
* Analisis komunikasi/audiens, termasuk partisipan, analisis perilaku dan saluran komunikasi
  + 1. Rancangan Strategik, mencakup tujuan komunikasi, pilihan saluran, implementasi perencanaan.
    2. Pengembangan dan Pengujian, mencakup pengembangan pesan dan uji pendahuluan.
    3. Implementasi dan Monitoring, mencakup pembangunan kapasitas.
    4. Evaluasi dan Perencanaan ulang.

**Gambar 1 : *P-Process***



Sumber: Tweneboa-Kodua, *et al*., 2008

Beberapa kualitas *P-Process* yang menjadikannya alat bantu yang sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pelaksanaan program adalah[[1]](#footnote-1):

1. *P-Process* bersifat sistematis dan rasional.
2. Selalu tanggap terhadap lingkungan yang berubah, dan bias disesuaikan dengan hasil temuan riset serta data-databaru.
3. Praktis, diterapkan di berbagai tingkatan dilapangan.
4. Strategis dalam menyusun dan mencapai tujuan jangka panjang.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Terdapat empat kemungkinan faktor yang melatarbelakangi tindakan sosial seseorang. Kemungkinan pertama, tindakan sosial individu bisa jadi dilandasi oleh faktor rasional yang diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh pelaku yang bersangkutan. Kemungkinan kedua, tindakan sosial individu dapat juga dilandasi oleh faktor rasional yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemungkinan lainnya, tindakan sosial individu dapat juga didasarkan oleh faktor emosional atau oleh factor kebiasaan (Ritzer, 2012: 216).

Keempat faktor yang melatarbelakangi tindakan sosial seseorang tersebut, tentunya berlaku pula sebagai faktor yang melatarbelakangi tindakan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses Pilkada. Tindakan netralitas ataupun tindakan keberpihakan (ketidaknetralan) ASN pada proses Pilkada tidak terlepas dari adanya keyakinan dan asumsi tertentu terhadap sesuatu yang pahami dan kemudian dijadikan acuan pemikiran.

Dalam setiap momentum proses Pilkada seringkali digunakan untuk mengejar keuntungan material, kekuasaan dan status sosial serta sebagai jalan pintas dalam mendekatkan diri dengan penguasa pemerintah. Untuk mendapatkan posisi tertentu, loyalitas ASN ditunjukan dengan memberikan dukungan dalam bentuk keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) dengan harapan nantinya akan mendapatkan perlindungan.

Partisipasi sosial masyarakat dan ASN serta netralitas ASN dalam proses Pilkada dapat dikatakan merupakan tindakan sosial yang dilakukan secara sadar oleh para pelaku, sebagai hasil dari pemaknaan terhadap sesuatu. Dalam hal ini para pelaku tindakan sosial ini memaknai gagasan terkait netralitas ASN dalam proses Pilkada yang disampaikan oleh Bawaslu Jabar sebagai komunikator. Proses pertukaran makna inilah yang akhirnya menghasilkan tindakan sosial berupa keikutsertaan secara aktif dari masyarakat dan ASN dalam menjaga netralitas ASN pada proses Pilkada di Provinsi Jabar yang dapat memberikan pengaruh positif bagi terwujudnya pilkada yang berkualitas.

Agar proses persuasi ini dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki, maka harus dipilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Pada tahapan pertama, dilakukan *analisis*, mencakup analisis tentang situasi, partisipan, perilaku dan saluran komunikasi. Pada tahapan kedua, dilakukan *rancangan strategik*, mencakup tujuan komunikasi, partisipasi komunitas dalam proses komunikasi, pilihan saluran komunikasi, implementasi perencanaan. Pada tahapan ketiga, dilakukan pengembangan dan pengujian, mencakup pengembangan pesan dan uji pendahuluan. Pada tahapan keempat, dilakukan *implementasi*, mencakup perubahan perilaku. Pada tahap kelima, dilakukan *evaluasi*, mencakup evaluasi partisipasi komunitas, dan evaluasi komunikasi internal (sistem manajemen pengetahuan, sistem informasi manajemen, dan komunikasi strategis).

**Gambar 2**

**Kerangka Pemikiran Penelitian Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015**

Implementasi

Pengembangan dan Pengujian

Rancangan

Strategik

Analisis

Evaluasi

Strategi Komunikasi

Persuasif / *P Proses*

Mengubah

Pola Pikir ASN

**Keyakinan**

**Tindakan**

**Sosial**

Memihak/tidak memihak

diperhitungkan dan diupayakan sendiri

kebiasaan turun-temurun

spontan

tidak rasional

ekspresi emosional

memperhitungkan kesesuaian cara dan tujuan

ditentukan kepercayaan

memperhitungkan manfaat

tujuan tidak terlalu dipertimbangkan

Rasional berorientasi tujuan

Rasional berdasarkan nilai

**Faktor-Faktor**

**yang Melatarbelakangi Tindakan Sosial**

Emosional

Kebiasaan

* Mempertahankan jabatan
* Peningkatan karir/kenaikan jabatan
* Keuntungan finansial
* Material
* Kekuasaan
* Status sosial
* Jalan pintas

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

* 1. **Paradigma Penelitian**

Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, yakni paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* (tindakan yang berarti sosial) melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003:3). Sementara itu, pola yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu induktif yang melihat suatu permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus/empiris menuju kepada hal-hal yang bersifat umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak dengan membandingkan konsep yang digunakan dengan data yang telah diperoleh.

* 1. **Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dinyatakan Strauss dan Corbin (2003:4) sebagai penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial dan hubungan timbal balik.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena memaparkan secara terinci dan spesifik mengenai situasi atau kondisi, keadaan sosial atau suatu hubungan. Tipe yang digunakan adalah penelitian deskripftif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

* 1. **Sumber Data Penelitian**
     1. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu para pemangku jabatan dalam institusi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) periode 2013-2018, yaitu mereka yang menempati posisi menentukan dalam seluruh aktivitas pengawasan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Mereka itulah yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini sedangkan yang menjadi informan pendukung utama yaitu pengamat/praktisi politik/komunikasi.

* + 1. **Teknik Menentukan Sumber Data**

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pemilihan sampel purposif atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2010:272).

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan informan yaitu:

1. Pimpinan/Anggota dan sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2. Pengamat/praktisi politik/komunikasi yang terlibat dalam kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan penjagaan netralitas ASN dalam proses Pilkada Tahun 2015.
   1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. *Document analysis*, dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada baik yang berupa dokumen maupun *records*.
2. *In-depth interviewing*, wawancara mendalam dengan narasumber dalam hal ini para pemangku jabatan di Bawaslu Jabar, pengamat dan/atau praktisi politik, dan komunikasi.
3. *Unstructure observation*, observasi langsung yang tidak berstruktur yaitu melihat serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan strategi komunikasi tanpa menggunakan panduan sebelumnya.
   1. **Langkah Analisis dan Aspek-aspek yang Digali**

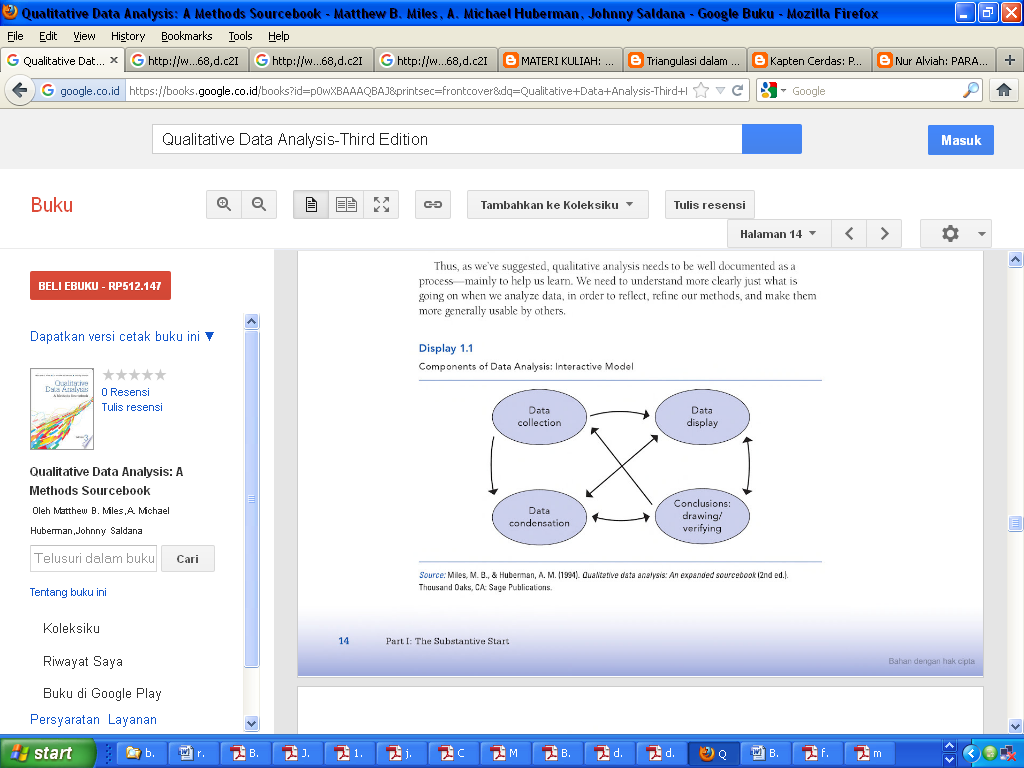
Empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pada tahapan pertama dilakukan analisis terhadap situasi, partisipan, perilaku dan saluran komunikasi.
2. Pada tahapan kedua dilakukan *rancangan strategik*, mencakup tujuan komunikasi, partisipasi komunitas dalam proses komunikasi, pilihan saluran komunikasi, implementasi perencanaan.
3. Pada tahap ketiga dilakukan pengembangan dan pengujian, mencakup pengembangan pesan dan uji pendahuluan
4. Pada tahapan kempat dilakukan *implementasi*, mencakup perubahan perilaku.
5. Pada tahapan kelima dilakukan *evaluasi*, mencakup evaluasi partisipasi komunitas, dan evaluasi komunikasi internal (sistem manajemen pengetahuan, sistem informasi manajemen, dan komunikasi strategis).
   1. **Metode Analisis Data**

Proses analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam model interaktif ini, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Model interaktif tersebut digambarkan berikut ini:

**Gambar 3** :

**Komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-33):

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*).
2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).
   1. **Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menghindari keragu-raguan dari keabsahan data yang diperolehnya, pada penelitian ini akan dilakukan uji keabsahan data guna meningkatkan derajat kepercayaan dari data yang diperoleh. Peneliti akan melakukan uji keabsahan data dengan trianggulasi (*peer debriefing*), yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data (Moleong, 2007:330).

**BAB IV**

**PROFIL BADAN PENGAWAS PEMILU JAWA BARAT**

* 1. **Sejarah Singkat Bawaslu Jabar**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya bernama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Panwaslu Provinsi) yang kelembagaanya bersifat *ad hoc.*

Bawaslu Jabar dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Jabar berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dengan alamat Kantor di Jalan Turangga Nomor 25 Kota Bandung. Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang Bawaslu Jabar secara umum adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan melakukan penindakan pelanggaran serta menyelesaikan sengketa pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Jabar didukung oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi, yang dipimpin oleh kepala secretariat. Sekretariat tersebut mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.

Dari sejak lahir 26 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2017, Bawaslu Jabar telah ikut terlibat dalam empat momentum gelaran kompetisi politik, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pilkada Serentak Tahun 2015, dan Pilkada Serentak Tahun 2017.

* 1. **Visi dan Misi Bawaslu Jabar**

Sebagai salah satu lembaga pengawas Pemilu yang berada di bawah Bawaslu RI, visi dan misi Bawaslu Jabar 2015-2019, mengikuti visi dan misi Bawaslu RI, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas” (Lampiran I Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015).

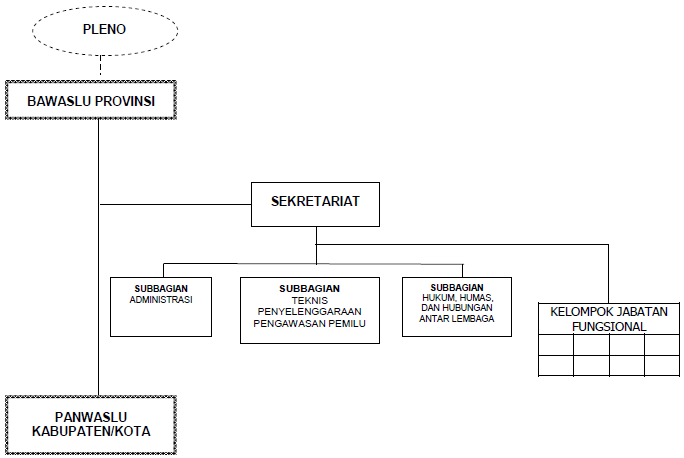
Adapum misi Bawaslu yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019 antara lain: (1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; (2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; (3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; (4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; (5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; (6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri (Lampiran I Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015).

* 1. **Struktur Organisasi Bawaslu Jabar**

Secara organisatoris dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Jabar bertanggung jawab kepada Bawaslu RI. Kepemimpinan di Bawaslu Jabar bersifat kolektif kolegial dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno. Dalam rapat pleno, ketiga anggota Bawaslu Jabar masing-masing mempunyai hak suara yang sama. Berikut struktur organisasi Bawaslu Jabar

**Gambar 5:**

**Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi**

****

Sumber: Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2013

* 1. **Pencegahan Pelanggaran Pada Pilkada Tahun 2015**

Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan Bawaslu Jabar pada momentum Pilkada serentak tahun 2015 diarahkan bagi tercapainya tujuan pengawasan Pilkada, yaitu: (1) Memastikan terselenggaranya Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada secara menyeluruh. (2) Mewujudkan Pilkada yang demokratis. (3) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pilkada.

Secara operasional dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada, terdapat dua startegi pengawasan yang dilaksanakan pengawas Pemilu yaitu pencegahan pelanggaran pilkada dan penindakan pelanggaran Pilkada. Pencegahan pelanggaran Pilkada difokuskan pada penyelenggara Pemilu/Pilkada, Peserta Pilkada, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada. Program dan kegitan yang dilakukan Bawaslu Jabar dalam rangka pencegahan pelanggaran pada Pilkada serentak Tahun 2015 diantaranya melalui kegiatan sosialisasi.

**Tabel 3:**

**Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2015**

| No | Nama Kegiatan | Sasaran | | | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kab./Kota | Peserta | Jumlah (Orang) |
|  | Seminar Kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 | Kab. Bandung | * OMS dan OKP * Media Masa * Tomas /Toga * Mahasiswa/Pelajar * Partai Politik | 100 | 8 Des 2014 |
| Kab. Indramayu | 100 | Des 2014 |
| Kab. Pengandaran | 100 | Des 2014 |
| Kab. Karawang | 100 | 3 Des 2014 |
| Kab. Sukabumi | 100 | Des 2014 |
|  | Seminar Pengawasan Partisipatif dan Kajian UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo.Nomor 8 Tahun 2015 | Kab. Cianjur | * OMS dan OKP * Media Massa * Tomas /Toga * Mahasiswa/Pelajar * Partai Politik | 100 | 12 Juni 2015 |
| Kab. Tasikmalaya | 100 | 9 Juni 2015 |
| Kota Depok | 100 | 5 Juni 2015 |
|  | Sosialisasi Pengawasan Partisifatif Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Kerjasama dengan OMS dan Perguruan Tinggi | Kota Depok | * OMS, OKP dan Mahasiswa * Media Massa * Partai Politik * *Stake holder* lainnya | 60 | 14 Agustus 2015 |
| Kab. Cianjur | 60 | 3 September 2015 |
| Kab. Bandung | 60 | 3 Juli 2015 |
| Kab. Indramayu | 60 | 19 Juni 2015 |
| Kab. Sukabumi | 60 | 29 Juli 2015 |
| Kab. Pengandaran | 60 | 16 Juni 2015 |
| Kab. Karawang | 60 | 30 Juni 2015 |
|  | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak Tahun 2015 bagi bagi Pemilih Pemula | Kota Depok | * Pelajar SMU/Sederajat yang telah memiliki hak Pilih * Undangan: Ketua KPU Kab/Kota, Pemerintah Daerah dan Media Massa | 100 | 1 Oktober 2015 |
| Kab. Cianjur | 100 | 21 Okt 2015 |
| Kab. Bandung | 100 | 02 Nov 2015 |
| Kab. Indramayu | 100 | 5 Nov 2015 |
| Kab. Sukabumi | 100 | 11 Nov 2015 |
| Kab. Tasikmalaya | 100 | 13 Nov 2015 |
| Kab. Pangandaran | 100 | 20 Nov 2015 |
| Kab. Karawang | 100 | 7 Oktober 2015 |
|  | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak Tahun 2015 bagi ASN dan Kepala Desa | Kota Depok | * Sekda dan Asisten Sekda * Kepala Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor * Camat * Lurah dan Kepala Desa | 150 | 1 Oktober 2015 |
| Kab. Cianjur | 150 | 21Oktober 2015 |
| Kab. Bandung | 150 | 2 November 2015 |
| Kab. Indramayu | 150 | 5 November 2015 |
| Kab. Sukabumi | 150 | 11 Nov 2015 |
| Kab. Tasikmalaya | 150 | 13 Nov 2015 |
| Kab. Pangandaran | 150 | 20 Nov 2015 |
| Kab. Karawang | 150 | 7 Oktober 2015 |

Sumber: Bawaslu Jabar, 2017

**BAB V**

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU JABAR DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015**

* 1. **Analisis**

Pada tahun 2015, diselenggarakan Pilkada serentak di tujuh Kabupaten dan satu kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok. Bersamaan dengan itu, dilaksanakan pula berbagai kegiatan diseminasi dan sosialisasi informasi seputar Pilkada yang diantaranya berkait regulasi dan pengawasan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak dan kelompok masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan organisasai kepemudaan, media massa, kelompok pemilih pemula (mahasiswa dan siswa), partai politik, termasuk kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan umum kegiatan tersebut diantaranya mendorong berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah baik dalam pengawasan tahapan dan subtahapannya maupun dalam penyampaian aduan atau laporan pelanggaran.

Di antara tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemilukada serentak tersebut, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki pelanggaran terbanyak, ketika terdapat pasangan calon kepala daerah yang berasal dari petahana atau keluarga petahana atau birokrasi. Kondisi tersebut menjelaskan posisi ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur yang menghadapi dilemma dan ujian bagi netralitas mereka sendiri, karena antara pasangan nomor urut dua (putra bupati petahana yang berpasangan dengan figur dari birokrasi lokal) dan pasangan nomor urut tiga (wakil bupati petahana yang berpasangan dengan figur dari birokrasi tingkat provinsi) memiliki hubungan yang sangat erat dengan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Kompetisi pasangan calon dalam pilkada Cianjur yang melibatkan petahana tersebut memunculkan indikasi dan kecenderungan terhadap keterlibatan politik ASN secara praktis terhadap salah satu pasangan calon sehingga dikhawatirkan terjadinya aksi dukung mendukung antara pendukung pasangan calon nomor dua dan pendukung pasangan calon nomor tiga.

Dasar atas perilaku ASN dalam melakukan pelanggaran netralitasnya merupakan bagian penting yang mendapat perhatian secara serius termasuk upaya-upaya membuka komunikasi yang efektif baik dengan ASN atau pihak-pihak lainnya untuk lebih menguatkan identitas, jati diri dan profesionalitas ASN sebagai factor inheren seorang ASN, sehingga capaian posisi jabatan dan karir lebih ditentukan oleh kinerja dan prestasi yang lebih baik dan memberi dampak perubahan yang positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

* 1. **Rancangan strategik**

Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN, dilakukan komunikasi terhadap multi *stakeholder*, artinya, komunikasi tidak hanya dilakukan pada ASN semata, melainkan juga kepada kelompok masyarakat secara umum, dengan tujuan:

1. Memperluas jejaring pengawasan pemilihan kepala daerah pada kelompok-kelompok strategis;
2. Menyediakan akses informasi, sarana dan fasilitas guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pengawasan, menyampaikan aduan, dan/atau laporan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah;
3. Mempersiapkan langkah preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu dan membangun pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat terhadap proses pengawasan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu Jabar melakukan penelaahan terhadap potensi kelompok-kelompok strategis yang dipandang dapat berkonstribusi secara positif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Pilkada. Adapun kelompok masyarakat strategis ini yaitu:

1. Sasaran primer yaitu Aparatur Sipil Negara
2. Sasaran sekunder yaitu : Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; Organisasi masyarakat dan Organisasi Kepemudaan; Media Massa (Cetak dan Elektronik, *online*); Pemilih Pemula (Siswa dan Mahasiswa); Partai Politik, dan Jajaran KPU Kab/Kota

Selain itu, Bawaslu Jabar juga melibatkan pihak yang diharapkan dapat berpartisipasi sebagai komunikator antara lain adalah Bawaslu RI, ahli tata pemerintahan/komunikasi politik/akademisi, unsur perwakilan Pemda Provinsi Jabar, Bupati/Walikota atau unsur perwakilan Pemda Kabupaten/Kota dan Ketua atau perwakilan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya Bawaslu Jabar melakukan pemilihan saluran komunikasi yang akan digunakan dalam upaya menjaga netralitas ASN dalam pilkada dengan mempertimbangkan ketercapaian maksud dan tujuan komunikasi dan aspek ketersedian anggaran sesuai dengan yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015.

Adapun saluran komunikasi yang dipilih Bawslu Jabar adalah saluran interpersonal, yakni saluran komunikasi melalui pertemuan tatap muka antara Bawaslu Jabar (komunikator) dan *stakeholder* Pilkada (komunikan) yang didalamnya disampaikan berbagai materi dari narasumber baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bawaslu Jabar dengan metode ceramah dan presentasi materi yang selanjutnya mendapat umpan balik (*feedback*) dari peserta (komunikan).

Strategi komunikasi yang dilakukan, mengarahkan terjadinya perubahan perilaku terhadap kelompok sasaraan meliputi :

1. Informasi dan pengetahuan, bahwa informasi dan pengetahuan dapat ditingkatkan setelah diberikan informasi dan pengetahuan tentang pilkada, pengawasan partisipatif, dan pentingnya netralitas bagi ASN
2. Tindakan dan sikap, bahwa tindakan dan sikap dapat diubah dan ditingkatkan setelah mendapatkan informasi dari sosialisasi mengenai pilkada, pengawasan partisipatif, dan pentingnya netralitas bagi ASN.

Dasar strategi dan pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran ASN dalam pilkada adalah dengan melakukan pendekatan kepada sasaran primer dan pendekatan komunitas kepada kelompok sasaran sekunder.

* 1. **Pengembangan dan Pengujian Rancangan Strategik**

Pengembangan rancangan komunikasi strategik dalam mencegah pelangaran netralitas ASN pada Pilkada, yaitu:

1. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat dan *stakeholder* Pilkada mengenai pengawasan Pilkada dan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pilkada.
2. Mengajak masyarakat dan *stakeholder* Pilkada untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi Pilkada.
3. Pengembangan media sosialisasi yang berupa pertemuan tatap muka antara Bawaslu Jabar (komunikator) dan berbagai *stakeholder* Pilkada (komunikan) di masing-masing Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2015 termasuk di Kabupaten Cianjur.
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada tahun 2015 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada.

Desain komunikasi pencegahan netralitas ASN dalam Pilkada telah disusun dan diaplikasikan (diuji-cobakan) guna mengetahui kelemahan dan kelebihannya sehingga dapat menghasilkan sebuah desain komuniaksi yang efektif, aplikatif dan tepat sasaran.

Salah satu bentuk uji coba tersebut yakni sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi, presentasi dilakukan oleh narasumber dengan metode ceramah dibantu dengan media slide berisi materi-materi sosialisasi. Selain itu, pada pelaksanaan sosialisasi tersebut dibuka pula ruang dialog atau diskusi antara peserta dengan narasumber.

Ujicoba rancangan komunikasi juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan *stakeholder* Pilkada tentang pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada yang kemudian akan dipertimbangkan kembali, sehingga tujuan dari sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut sesuai dengan yang direncanakan atau diinginkan oleh Bawaslu Jabar sebagai pembuat pesan. Revisi dilakukan setelah tahap uji coba program sosialisasi pengawasan partisipatif terlaksana. Apabila dalam uji terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan.

* 1. **Implementasi Strategi**

Sebagai bagian dari bentuk tindakan pencegahan, yang dilakukan Bawaslu Jabar adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap multi *stakeholder*. Pencegahan pelanggaran netralitas ASN Pada Pilkada 2015 dengan saluran komunikasi melalui pertemuan tatap muka antara Bawaslu Jabar (komunikator) dan *stakeholder* Pilkada (komunikan), tidak hanya dilakukan pada ASN semata, melainkan juga kepada kelompok masyarakat secara umum. Bentuk-bentuk implementasi tersebut yaitu:

1. Seminar pengawasan partisipatif dan kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Nomor 8 Tahun 2015.
2. Sosialisasi pengawasan partisifatif dalam Pilkadakerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi Tahun 2015.
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pilkada Langsung Serentak Tahun 2015 Bagi Pemilih Pemula.
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pilkada Tahun 2015 Bagi ASN dan Kepala Desa.

Secara umum, materi yang disampaikan pada seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksnakan Bawaslu Jabar meliputi: (1) materi pengawasan Pemilu, (2) jenis dan bentuk pelanggaran, (3) jenis dan bentuk sanksi, dan (4) dampak pelanggaran terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu.

* 1. **Evaluasi Strategi**

Pada evaluasi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum terdapat tiga tahapan evaluasi, yaitu evaluasi tahap persiapan, evaluasi tahapan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengaruh atau efek.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan strategi komunikasi Bawaslu Jabar, diketahui:

* + 1. Respon positif terhadap kegiatan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaran pilkada
    2. Adanya keinginan dari ASN untuk mengetahui konsep penataan dan penguatan birokrasi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
    3. Munculnya komitmen dan statemen dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengedepankan profesionalitas dalam penataan birokrasi di jajaran ASN
    4. Pelibatan media cetak dan elektronik dan penggunaan teknologi dalam optimalisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
    5. Sosialisasi yang lebih massif terhadap pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN

Secara spesifik, dari hasil evaluasi terhadap strategi komunikasi Bawaslu Jabar, diketahui tingkat partisipasi komunitas dan efek dari kegiatan Bawaslu Jabar dalam mengukur keberhasilan strategi komunikasinya dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada yaitu:

1. Partisipasi komunitas pada pencapaian tujuan kegiatan.

Partisipasi komunitas dilihat dari keterkaitan antara perencanaan dengan implementasi kegiatan yang telah dilakukan, meliputi:

1. Penyampai pesan (Pemateri)

Pihak-pihak yang telah ditentukan Bawaslu Jabar dalam kegiatan sosialisasi untuk diminta menjadi pemateri, seluruhnya dapat terpenuhi.

1. Sasaran/*Audience*

Ketercapaian segmen yang menjadi sasaran sosialisasi baik dari segi jumlah maupun pihak-pihak yang akan menjadi audien melalui pendekatan perwakilan kelembagaan/institusi sesuai dengan yang direncanakan.

Begitu pula dalam antusiasme audience yang cukup tinggi ketika menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang disampaikan pemateri dengan rata-rata berjumlah 3-6 orang, sesuai waktu yang telah dibatasi dalam setiap kegiatan sosialisasi.

1. Media

Bentuk sosialisasi secara tatap muka dengan sasaran/*audience* dipandang sedikit lebih dinamis daripada komunikasi satu arah, sosialisasi dengan model ini dapat lebih mengeksplorasi permasalahan karena isi pesan (*content*) dikemas secara lentur dan persuasif. Selain itu, pada sosialisasi secara tatap muka proses umpan balik antara *encoder* dan *decoder* dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan tujuan pengirim pesan. Walaupun demikian, melalui cara seperti ini cenderung melibatkan peserta secara terbatas, sehingga jangkauan penerima pesan hanya terdiri dari kelompok tertentu saja.

Selain itu, dalam mengukur keberhasilan program komunikasinya, Bawaslu Jabar menggunakan indikator pelaksanaan tugas dan fungsi serta aspek anggaran. Dari aspek tugas dan fungsi, dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Jabar. Adapun dari aspek anggaran, melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, secara otomatis, anggaran yang bersumber dari Negara yang telah direncanakan untuk kegiatan tersebut dapat terserap dengan baik yang berarti juga penilaian terhadap kinerja Bawaslu Jabar.

**Tabel 4**

**Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar pada Pilkada 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahapan** | **Kegiatan** |
| Analisis | Menelaah sinkronisasi antara *stakeholder* dengan regulasi  Memetakan sikap dan perilaku ASN  Mengidentifikasikan medium (saluran komunikasi) |
| Rancangan Strategik | Menentukan tujuan komunikasi  Memperluas jaringan komunikasi  Menentukan sasaran komunikasi  Mengakomodasi kepentingan *stakeholder*  Memilih medium (saluran komunikasi) |
| Pengembangan dan Pengujian Rancangan Strategik | Mengembangkan media sosialisasi  Melakukan *fous group discussion*  Melakukan ujicoba rancangan komunikasi |
| Implementasi Strategi | Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada *stakeholder*  Mengajak *stakeholder* untuk berpartisipasi  Menyosialisasikan pengawasan partisipatif |
| Evaluasi Strategi | Menelaah kembali setiap tahapan  Mengamati perkembangan dari pelaksanaan sosialisasi  Menerima berbagai masukan terkait sosialisasi pengawasan partisipatif |

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

**5.6 Diskusi**

Penelitian ini telah menunjukkan, komunikasi sebagai pertukaran informasi dan dialog merupakan bagian penting dari semua proses dasar pilkada. Aktivitas komunikasi ini merupakan bagian dari pembangunan dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), kehidupan masyarakat yang berdayaguna dan dinamis. Tak satu pun dari proses pilkada ini dapat terjadi tanpa komunikasi antara dan di antara semua sektor masyarakat.

Komunikasi Strategis lebih dari sekedar menyebarkan informasi namun juga ajakan aktif dari perspektif para pemangku kepentingan. Komunikasi strategis memastikan terjadinya komunikasi timbal-balik, membahas faktor manusia seperti budaya, perilaku, dan politik, serta membantu membangun konsensus dan kemitraan mengenai agenda pilkada.

**BAB VI**

**SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

* 1. **Simpulan**

Secara umum, untuk menjaga netralitas aparatur sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Barat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kota/kabupaten, pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar melakukan strategi komunikasi berdasarkan model *P-Process*. Secara khusus, strategi komunikasi model *P-Process* yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar ini meliputi tahapan:

* + - 1. *Analisis*, seperti menelaah sinkronisasi antara *stakeholder* dengan regulasi, memetakan sikap dan perilaku ASN, dan mengidentifikasikan medium (saluran komunikasi).
      2. Rancangan strategic, seperti menentukan tujuan komunikasi, memperluas jaringan komunikasi, menentukan sasaran komunikasi, mengakomodasi kepentingan *stakeholder* dan memilih medium (saluran komunikasi).
      3. Pengembangan dan pengujian rancangan strategik, seperti mengembangkan media sosialisasi, melakukan *fous group discussion*, dan Melakukan ujicoba rancangan komunikasi.
      4. Implementasi strategi, seperti memberikan pemahaman dan penjelasan kepada *stakeholder*,mengajak *stakeholder* untuk berpartisipasi, dan menyosialisasikan pengawasan partisipatif.
      5. Evaluasi strategi, seperti menelaah kembali setiap tahapan, mengamati perkembangan dari pelaksanaan sosialisasi, dan menerima berbagai masukan terkait sosialisasi pengawasan partisipatif.
  1. **Rekomendasi**

1. Strategi komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Jabar hendaknya diikti oleh kajian empiric lainnya seperti mengukur efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif, tingkat kesadaran ASN, terpaan media terhadap sikap dan/atau perilaku para *stakeholder*.
2. Pihak Bawaslu Jabar hendaknya mendorong para Panwaslku kota/kabupaten agar secara aktif melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah persuasif untuk menjaga netralitas ASN di wilayahnya masing-masing.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.

Bertrand, Alvin L. (Editor), 1958. *Rural Sociology*. New York: McGraw-Hill Book Company Inc.

Broom, Leonard., Philip Selznick & Dorothy Bromm Darroch. 1977. *Sociology*, seventh edition. New York: Harper & Row Publishers.

Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi.* Edisi Revisi 2016. Jakarta: Rajawali Pers

*Dedy N. Hidayat.* 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik.* Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Effendy, Onong, Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hasan, Erlina. 2014. *Komunikasi Pemerintahan.* Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Miles, Mathew B, Michael Huberman & Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*.Jakarta:UI Press

Moleong, Lexsi J. 2013.*Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Ritzer, George, 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik SampaiPerkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tweneboa-Kodua, Arthur & Camilla Merrild, Lazeena Muna, Mira Mitra, Nafisa Binte Shafique, Nawshad Ahmed, Ohidur Rashid, Shirin Hussain, Syeedul Hoque Milky, Tamanna Taher, Tasmia Bashar, Zafrin J. Chowdhury. 2008. *Writing A Communication Strategy for Development Programmes: A Guideline for Programme Managers and Communication Officers*. United Nations Children's Fund (UNICEF). Bangladesh.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015–2019,

**Media Masadan Internet**

Bappenas. *Analisis Isu Netralitas ASN/PNS Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak 2015*. http://old.bappenas.go.id/files/data/Politik\_ Hukum\_Pertahanan\_dan\_Keamanan/Netralitas%20PNS%20dalam%20Pilkada.pdf, diakses 5 September 2016, 13.03 WIB

1. http://tipsdancarabaru.blogspot.co.id/2013/10/keunggulan-p-procces.html [↑](#footnote-ref-1)